

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan daerah pada BPKAD Provinsi Sumatera Barat telah dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah. Proses tersebut dilakukan untuk mendukung terciptanya pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.
2. Pengelolaan aset daerah telah dilakukan melalui berbagai tahapan, seperti perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan dan pemanfaatan, penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, serta pemindahtanganan dan penghapusan aset. Pengelolaan tersebut bertujuan agar Barang Milik Daerah (BMD) dapat tercatat dengan baik, terjaga, dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kegiatan pemerintahan.
3. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah masih terdapat beberapa kendala, seperti keterlambatan penyampaian dokumen dari OPD, perubahan regulasi, keterbatasan pemahaman sumber daya manusia, serta

masih terdapat aset yang belum tertib administrasi dan belum dimanfaatkan secara maksimal. Namun, BPKAD terus melakukan upaya perbaikan melalui peningkatan koordinasi, evaluasi, serta optimalisasi sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, penulis menyarankan agar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat meningkatkan beberapa aspek dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, yaitu sebagai berikut:

1. BPKAD Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat terus meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh OPD terkait penyampaian dokumen administrasi keuangan dan aset. Hal ini bertujuan agar proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dapat berjalan lebih tepat waktu serta mengurangi hambatan dalam pengelolaan keuangan daerah.
2. BPKAD Provinsi Sumatera Barat perlu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan sosialisasi regulasi terbaru mengenai pengelolaan keuangan maupun aset daerah. Dengan peningkatan pemahaman pegawai, diharapkan pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara lebih efektif, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. BPKAD Provinsi Sumatera Barat diharapkan terus melakukan optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) melalui inventarisasi secara berkala, penertiban administrasi aset, penyelesaian dokumen kepemilikan aset, serta pemanfaatan aset yang belum produktif. Hal ini dilakukan agar aset daerah dapat memberikan manfaat yang maksimal dan mendukung peningkatan kualitas pengelolaan pemerintahan daerah.

